

Dampak Kapasitas Fiskal terhadap Penurunan Kemiskinan: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan

Impact of Fiscal Capacity on Poverty Reduction: A Policy Simulation Analysis

Vera Lisna^{a,*}, Bonar M. Sinaga^b, Muhammad Firdaus^b, Slamet Sutomo^a

^a*Badan Pusat Statistik*

^b*Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Pascasarjana IPB*

Abstract

This study examines the impacts of fiscal capacity on the acceleration of poverty alleviation through a dynamic simultaneous equations model using empirical data of 23 provinces and conducting historical simulation. The increasing of fiscal capacity from local taxes and tax-revenue sharing have significant impact on poverty reduction, particularly in agricultural household, which has the largest share in number of poor in Indonesia indicated by larger decline of agricultural headcount index than industrial and trade headcount index. However, the increasing of General Allocator Fund/*Dana Alokasi Umum (DAU)* has negative impact on agricultural headcount index. The policy implication is to increase revenue from taxation by local governments as the impact is more effective in accelerating poverty reduction.

Keywords: Fiscal Capacity, Poverty Reduction, Policy Simulation

Abstrak

Studi ini menganalisis dampak kapasitas fiskal dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui jalur pertumbuhan *pro-poor* melalui model persamaan simultan dinamis atas data empiris 23 provinsi dan simulasi historis. Peningkatan kapasitas fiskal dari pajak daerah dan bagi hasil pajak berdampak paling besar dalam menurunkan kemiskinan terutama di rumah tangga pertanian yang mendominasi jumlah penduduk miskin di Indonesia di mana *headcount index* pertanian turun lebih besar dibandingkan *headcount index* industri dan perdagangan. Sebaliknya, peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) berdampak negatif pada kemiskinan pertanian. Implikasinya adalah pemerintah daerah perlu meningkatkan penerimaan dari perpajakan karena dampaknya lebih efektif mempercepat pengentasan kemiskinan.

Kata kunci: Kapasitas Fiskal, Penurunan Kemiskinan, Simulasi Kebijakan

JEL classifications: H71, H75, I32

Pendahuluan

Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Peme-

rintahan Daerah menyebabkan tingginya ketergantungan keuangan pemerintah daerah pada dana transfer dari pemerintah pusat khususnya Dana Alokasi Umum (DAU). Selama tahun 2005–2011, total realisasi transfer ke daerah melalui mekanisme dana perimbangan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) naik dari Rp143,2 triliun menjadi Rp347,2 triliun di mana kom-

*Alamat Korespondensi: Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710. E-mail: veralisna@yahoo.com; veralisna@bps.go.id.

Tabel 1: Perkembangan Rata-Rata Beberapa Indikator Fiskal Riil^a Daerah^b di Indonesia

Tahun	Belanja Daerah (Triliun Rp)	Kapasitas Fiskal ^c (Triliun Rp)	Fiscal Gap ^d (Triliun Rp)	Derajat Kemandirian Fiskal ^e (%)	DAU
2005	6,57	3,17	3,39	16,8	3,27
2006	8,18	3,39	4,78	14,1	4,66
2007	9,62	3,41	6,21	13,4	5,01
2008	10,05	3,86	6,19	15,0	4,91
2009	10,53	3,60	6,93	13,8	4,85
2010	10,92	4,22	6,71	15,1	4,79
2011	11,72	4,74	6,98	17,8	5,28
Pertumbuhan (%)	78,4	49,2	105,8	1,06 ^f	61,2
Pertumbuhan per Tahun (%)	13,1	8,2	17,6	0,26 ^f	10,2

Catatan: ^aKonversi Nominal ke Riil menggunakan IHK Provinsi Tahun Dasar 2007;

^bAngka Provinsi termasuk Semua Kabupaten/Kota di setiap Provinsi;

^cPAD + Dana Bagi Hasil;

^dBelanja Daerah - Kapasitas Fiskal;

^eRasio PAD terhadap total belanja daerah;

^fDalam persen poin

Sumber: Kemenkeu R. I., diolah

posisi DAU meningkat dari 62% menjadi 65% (Indonesia, 2012). Hal ini dapat terjadi karena kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) daerah terus meningkat sehingga kekurangan sumber keuangan daerah untuk membiayai belanja-belanja harus daerah diatasi dengan transfer fiskal dari pemerintah pusat. Tabel 1 menunjukkan kesenjangan fiskal riil rata-rata naik 8,2% per tahun. Sementara itu, total belanja daerah riil rata-rata naik 13,1% per tahun. Tingginya kenaikan belanja daerah merupakan konsekuensi penerapan kebijakan desentralisasi fiskal yang melimpahkan kewenangan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah melalui tugas-tugas pengeluaran (*expenditure assignments*).

Akan tetapi, kewenangan penerimaan keuangan daerah melalui tugas-tugas penerimaan (*revenue assignments*) sangat terbatas, sehingga meskipun kapasitas fiskal meningkat tetapi belum mampu membiayai belanja daerah yang semakin besar. Akibatnya, transfer fiskal pun meningkat, terutama DAU yang merupakan transfer tidak bersyarat (*unconditional transfer*). Namun, kemudahan untuk mendapatkan dana transfer DAU menyebabkan pemerintah daerah kurang maksimal dalam mengeksplorasi sumber-sumber penerimaannya terutama pa-

jak. Menurut Bird (2011), jika pemerintah daerah menjadi lebih boros (*bigger spenders*) karena penerapan desentralisasi fiskal, maka untuk kepentingan responsibilitas fiskal dan akuntabilitas fiskal seharusnya kemampuan mengumpulkan pajak daerah juga lebih besar (*bigger taxers*). Namun, pada kenyataannya kemampuan mengumpulkan pajak yang digambarkan oleh peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai belanja daerah relatif kecil. Derajat kemandirian fiskal (*fiscal autonomy*) selama tahun 2005–2011 hanya naik dari 16,8% menjadi 17,8%. Jika mengacu pada kriteria Balitbang Depdagri dan Fisipol UGM (1991), maka derajat kemandirian fiskal daerah tersebut masih tergolong kurang mandiri. Rendahnya derajat kemandirian fiskal daerah dapat terjadi karena komposisi PAD pada total pendapatan daerah rendah. Tahun 2011, rata-rata kontribusi PAD hanya 17,8%, sedangkan rata-rata transfer fiskal 72,9% dengan rata-rata DAU 50,4%.

Selain PAD, sumber pendapatan daerah lainnya adalah bagi hasil pajak. Sumber keuangan ini berasal dari bagi hasil dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB) yang dikelola oleh pemerintah pusat. Akan tetapi, porsi yang diterima daerah relatif kecil. Sebagai contoh, daerah hanya menerima PPh 20% sesuai UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 13 Ayat 1 yang berbunyi "Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat 2 Huruf c yang merupakan bagian Daerah adalah sebesar 20% (dua puluh persen)". Rendahnya penerimaan pajak daerah dan bagi hasil pajak menyebabkan rendahnya kapasitas fiskal daerah sehingga kesenjangan fiskal meningkat yang diikuti dengan meningkatnya ketergantungan keuangan daerah pada dana transfer fiskal.

Tingginya ketergantungan fiskal berdampak pada *trade-off* antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Tabel 2 menunjukkan laju Produk Domestik Bruto (PDB) riil tahun 2005–2011 naik dari 5,7% menjadi 6,5% diikuti turunnya angka kemiskinan (*headcount index*) dari 16,0% menjadi 12,5%. Akan tetapi ketimpangan pendapatan (indeks Gini) naik dari 0,36 menjadi 0,41. Indikator ketimpangan pendapatan *World Bank* juga menunjukkan hal serupa di mana distribusi pengeluaran kelompok 20% penduduk teratas meningkat dari 44,9% menjadi 48,4%, sedangkan distribusi pengeluaran kelompok 40% penduduk terbawah turun dari 18,8% menjadi 16,9%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih dinikmati kelompok penduduk kaya, sementara penduduk miskin hanya menikmati sebagian kecil dari manfaat pertumbuhan ekonomi tersebut. Selain itu, jumlah penduduk miskin mayoritas berada di rumah tangga pertanian di mana proporsinya cenderung meningkat dari 55,4% menjadi 56,9%. Kenyataan ini menunjukkan implementasi kebijakan desentralisasi fiskal yang mengutamakan instrumen DAU mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi distribusi pendapatan semakin tidak merata dan kelompok penduduk miskin yang bekerja di

sektor pertanian semakin dirugikan. Dengan perkataan lain, kebijakan desentralisasi fiskal yang mengutamakan transfer fiskal tidak memihak mayoritas penduduk miskin di Indonesia. Hal ini didukung oleh Nanga (2006) yang menemukan bahwa transfer fiskal dalam berbagai bentuknya cenderung lebih menguntungkan sektor nonpertanian dari pada sektor pertanian padahal fakta menunjukkan mayoritas penduduk miskin tinggal di daerah pedesaan dan bekerja di sektor pertanian, sehingga ada indikasi bahwa kemiskinan di pedesaan semakin buruk setelah diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal. Jika dikaitkan dengan perilaku pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber-sumber pendapatannya, maka hal ini dapat diduga akibat fenomena *flypaper effect* karena pemerintah daerah lebih boros (*overspending*) dalam membelanjakan dana transfer khususnya DAU untuk kegiatan-kegiatan yang tidak strategis dalam mempercepat pengentasan kemiskinan.

Tingginya transfer fiskal DAU dan adanya fenomena *flypaper effect* membawa kepada suatu pemikiran mengenai pentingnya peningkatan kapasitas fiskal khususnya melalui penerimaan pajak daerah dan bagi hasil pajak. Pemikiran ini didasarkan pada peran pajak dalam redistribusi pendapatan melalui fungsi *budgeter* dan fungsi regulasi. Pajak berperan dalam mengumpulkan dana dari masyarakat yang kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan melalui fungsi *budgeter* dan berperan mengatur kegiatan ekonomi, alokasi sumber daya, serta redistribusi pendapatan dan konsumsi melalui fungsi regulasi (Musgrave dan Musgrave, 1989). Dengan pemikiran tersebut, maka penggunaan dana kapasitas fiskal khususnya pajak dan bagi hasil pajak lebih dialokasikan untuk belanja-belanja daerah yang strategis dalam mengentaskan kemiskinan. Akan tetapi, studi-studi empiris yang mengkaji dampak kapasitas fiskal terhadap kemiskinan sangat terbatas. Studi-studi empiris terdahulu umumnya mengkaji dampak kebijak-

Tabel 2: Perkembangan Rata-Rata Beberapa Indikator Fiskal Riil^a Daerah^b di Indonesia

Tahun	Laju PDB Riil ¹ (%)	Kemiskinan Headcount Index (%)	Distribusi Penduduk Miskin menurut Kelompok Rumah tangga(%)				Indeks Gini	Distribusi Pengeluaran (%)	
			Pertanian	Industri Pengolahan	Perdagangan, Hotel, Restoran	Lainnya		20% Atas	40% Bawah
2005	5,7	15,97	55,4	6,8	8,3	29,5	0,36	44,9	18,8
2006	5,5	17,75	53,9	6,8	8,9	30,4	0,33	42,2	19,8
2007	6,3	16,58	52,9	5,7	8,0	33,4	0,36	44,8	19,1
2008	6,0	15,42	53,3	6,3	8,1	32,3	0,35	44,8	19,6
2009	4,6	14,15	53,5	2,9	5,8	37,9	0,37	41,2	21,2
2010	6,2	13,33	69,8	0,5	0,4	29,3	0,38	45,5	18,1
2011	6,5	12,49	56,9	6,1	7,0	30,0	0,41	48,4	16,9

Catatan: ¹Perubahan PDB Harga Konstan Tahun 2000
Sumber: BPS, data diolah

an desentralisasi fiskal dalam konteks transfer fiskal dan desentralisasi pengeluaran, antara lain Nanga (2006), Qiao *et al.* (2008), serta Sina-ga dan Siregar (2003).

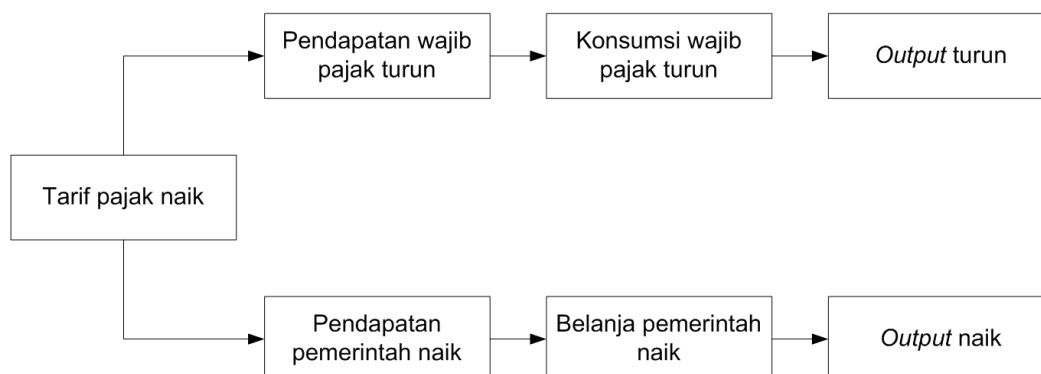
Oleh karena itu, studi ini dianggap perlu dilakukan dengan pemikiran bahwa: (1) ada fenomena *flypaper effect*; (2) kapasitas fiskal melalui pajak dan bagi hasil pajak lebih dialokasikan untuk belanja-belanja daerah yang sesuai dengan strategi pengentasan kemiskinan; dan (3) peningkatan pajak dalam jangka pendek tidak memengaruhi pengeluaran penduduk miskin yang mayoritas bukan wajib pajak. Untuk membuktikan hipotesis bahwa kebijakan peningkatan kapasitas fiskal melalui pajak daerah dan bagi hasil pajak berdampak mempercepat penurunan kemiskinan, maka studi ini dilakukan dengan tujuan untuk: (1) menguji fenomena *flypaper effect* pada belanja-belanja daerah yang tidak strategis dalam mengentaskan kemiskinan; (2) menguji elastisitas kapasitas fiskal terhadap belanja-belanja daerah yang strategis dalam mengentaskan kemiskinan; (3) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan; dan (4) menganalisis dampak kapasitas fiskal dan transfer fiskal terhadap kemiskinan yang memihak mayoritas penduduk miskin di Indonesia, yaitu di kelompok rumah tangga dengan kepala rumah tangga bekerja di sektor pertanian. Untuk membandingkan dampaknya pada kelompok-kelompok rumah tang-

ga lain, maka analisis dilakukan juga pada kelompok rumah tangga industri pengolahan dan kelompok rumah tangga perdagangan, hotel, dan restoran.

Tinjauan Referensi

Kebijakan Fiskal

Secara umum, kebijakan fiskal dilakukan melalui instrumen pajak (T) dan belanja pemerintah (G). Perubahan pajak dapat memengaruhi *output* melalui dua cara. Gambar 1 menunjukkan bahwa peningkatan tarif pajak akan mengurangi pendapatan wajib pajak sehingga konsumsi wajib pajak menurun dan *output* menurun. Sebaliknya, peningkatan pendapatan pemerintah dari pajak akan meningkatkan belanja-belanja pemerintah yang selanjutnya akan meningkatkan *output* melalui efek belanja pemerintah. Meskipun kedua instrumen fiskal tersebut secara langsung mengubah *output*, tetapi besaran perubahan tersebut tidak selalu sama karena adanya efek pengganda (*multiplier effect*). Besar kecilnya pengganda pajak (*tax multiplier*) tergantung pada kesediaan masyarakat untuk mengonsumsi (*willingness to consume*) yang diukur dengan *marginal propensity to consume* (MPC). Untuk mengukur perubahan aktual *output* akibat perubahan pajak, digunakan *tax multiplier* yang dihitung dengan

Gambar 1: Dampak Peningkatan Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

mengalikan perubahan pajak (ΔT) dengan *tax multiplier effect* ($\frac{-MPC}{1-MPC}$). Dengan demikian, peningkatan pajak sebesar ΔT secara langsung akan mengurangi *output* sebesar $\frac{\Delta T X MPC}{1-MPC}$. Di sisi lain, peningkatan pajak menambah sumber pendapatan pemerintah yang selanjutnya dapat digunakan sebagai tambahan belanja pemerintah (G). Perubahan aktual *output* akibat perubahan belanja pemerintah diukur dengan *government spending multiplier* yang dihitung dengan mengalikan perubahan belanja pemerintah (ΔG) dengan *government spending multiplier effect* ($\frac{1}{1-MPC}$). Dengan demikian, peningkatan belanja pemerintah sebesar ΔG secara langsung akan meningkatkan *output* sebesar $\frac{\Delta G}{1-MPC}$. Perubahan belanja pemerintah tersebut dapat memberi efek yang lebih besar dibandingkan jumlah nominalnya. Peningkatan belanja pemerintah dapat meningkatkan pendapatan individual penduduk yang akan meningkatkan pengeluaran untuk konsumsi sehingga kemiskinan berkurang. Dengan demikian, peningkatan pajak secara tidak langsung berdampak mengurangi kemiskinan melalui *government spending multiplier* jika peningkatan pajak tersebut efektif digunakan untuk meningkatkan konsumsi penduduk miskin.

Keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu, strategi pembangunan

nasional harus dilakukan di tingkat daerah, salah satunya melalui kebijakan desentralisasi fiskal. Pelimpahan kewenangan penganggaran belanja daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dilakukan dengan pemikiran pemerintah daerah merupakan institusi yang lebih dekat dengan masyarakat sehingga lebih mengetahui prioritas kebutuhan pembangunan daerahnya. Kebijakan ekspansi fiskal dengan meningkatkan belanja pemerintah daerah akan berdampak positif pada perekonomian, baik dari sisi Permintaan Agregat (*Aggregate Demand*) maupun Penawaran Agregat (*Aggregate Supply*). Dengan asumsi peningkatan belanja pemerintah digunakan untuk membiayai program-program sektoral, maka produksi sektoral akan meningkat sehingga total *output* daerah (Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)) meningkat. Untuk membiayai pembangunan daerah, pemerintah daerah harus memiliki sumber-sumber pendanaan yang memadai. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat 2, pendapatan daerah bersumber dari PAD, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain. Pada Pasal 6 disebutkan bahwa PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lain-lain yang sah. Selain itu, peningkatan penerimaan pajak nasional dari pajak-pajak langsung (PPh, PBB,

dan BPHTB) akan meningkatkan pendapatan fiskal daerah dari dana bagi hasil pajak. Dengan demikian, peningkatan penerimaan pajak di tingkat nasional dan daerah akan meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

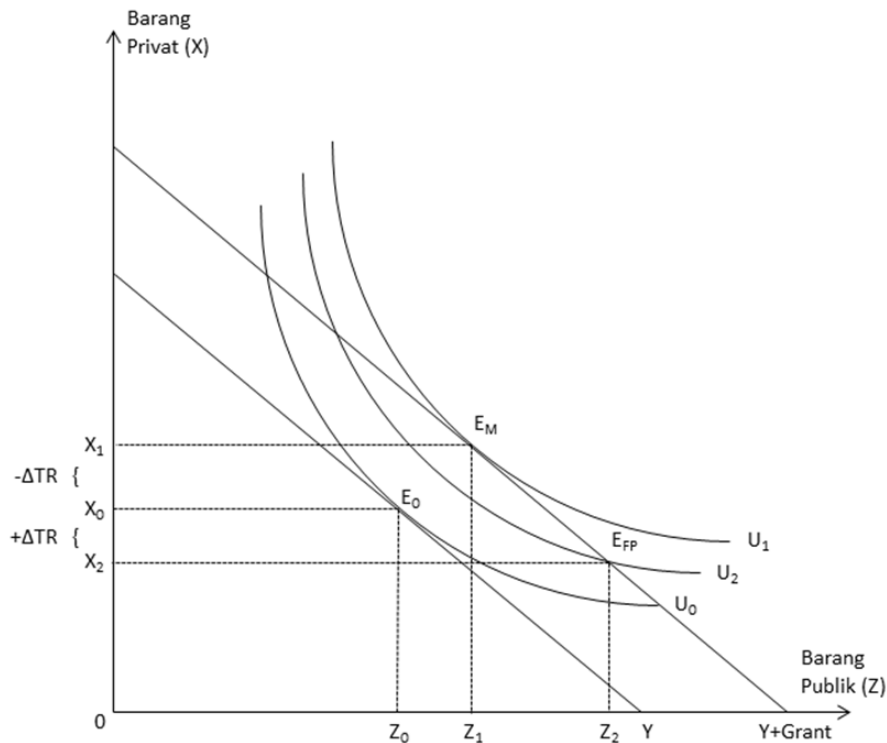
Kekurangan sumber dana untuk membiayai belanja-belanja daerah diatasi dengan transfer fiskal dari pemerintah pusat. Akan tetapi, alokasi transfer fiskal yang terjadi di negara-negara berkembang lebih didasarkan pada aspek pengeluaran dan kurang memperhatikan kemampuan pengumpulan pajak (Naganathan dan Sivagnanam, 2000). Akibatnya, basis pajak lokal (*local tax base*) tidak dieksplorasi secara maksimal (Oates, 1999) sehingga ketergantungan pada transfer fiskal semakin tinggi. Dalam kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia, transfer fiskal dilakukan melalui mekanisme dana perimbangan dengan komponen DAU, Dana Alokasi Khusus (DAK), bagi hasil pajak, dan bagi hasil sumber daya alam. Pengaruh transfer fiskal pada kinerja fiskal pemerintah daerah dapat dijelaskan dengan teori perilaku konsumen. Dengan menggunakan format garis anggaran (*budget line*) dan kurva indifferens (*indifference curve*), Wilde (1968) dalam Kuncoro (2004) menunjukkan peningkatan transfer tidak bersyarat (*unconditional grants*) sebesar "Grant" akan meningkatkan anggaran pemerintah daerah ditunjukkan oleh garis anggaran yang bergeser dari "Y" ke "Y + Grant" (Gambar 2). Bergesernya garis anggaran akan menggeser keseimbangan konsumen dari titik E_0 pada kurva indifferens U_0 ke titik E_M pada kurva indifferens U_1 . Pada posisi keseimbangan yang baru tersebut, konsumsi barang publik dan barang privat masing-masing meningkat dari Z_0 ke Z_1 dan dari X_0 ke X_1 . Sifat transfer tidak bersyarat (*unconditional transfer*) menyebabkan tekanan fiskal pada basis pajak lokal menurun sehingga penerimaan pajak daerah turun sebesar $-\Delta TR$ sementara belanja barang publik tetap meningkat. Artinya, transfer fiskal akan mengurangi beban pajak masyarakat sehingga pemerintah daerah tidak

perlu menaikkan pajak untuk membiayai penyediaan barang publik. Dengan perkataan lain, tidak ada perbedaan peningkatan belanja pemerintah daerah untuk menyediakan barang publik sebagai dampak kenaikan transfer atau dampak penurunan pajak daerah. Akan tetapi, anomali transfer fiskal *flypaper effect* menyebabkan keseimbangan turun ke titik E_{FP} pada kurva indifferens U_2 . Artinya, ada kenaikan penerimaan pajak daerah sebesar $+\Delta TR$ dan kenaikan konsumsi barang publik dari Z_1 menjadi Z_2 . Hal ini menunjukkan *unconditional transfer* meningkatkan belanja daerah untuk konsumsi barang publik, tetapi tidak menjadi substitusi bagi penerimaan pajak daerah. Kondisi tersebut menggambarkan adanya fenomena *flypaper effect* di mana elastisitas belanja daerah terhadap penerimaan transfer lebih tinggi daripada elastisitas belanja daerah terhadap penerimaan pajak daerah (Oates, 1999).

Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

Kemiskinan pendapatan (*income poverty*) merupakan konsep kemiskinan yang paling banyak dipakai dalam perspektif ekonomi karena terukur dan terkait dengan indikator-indikator perekonomian lainnya. Dengan konsep ini, kemiskinan diukur sebagai ketidakmampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) makanan dan non-makanan dengan batasan Garis Kemiskinan (*Poverty Line*). Konsep tersebut dikenal dengan kemiskinan absolut. Penghitungan angka kemiskinan absolut di Indonesia dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batasan Garis Kemiskinan (GK) yang merupakan penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Ukuran kemiskinan yang paling banyak digunakan adalah *headcount index* yang sering dilambangkan dengan P_0 yang dihitung dengan formula *Foster-Greer-Thorbecke* (FGT) yang dikembangkan oleh Foster *et al.* (1984). *Headcount index* mengukur proporsi

Gambar 2: Dampak Transfer Tidak Bersyarat



Sumber: Wilde (1968) dalam Kuncoro (2004)

populasi penduduk yang tergolong miskin (Haughton dan Khandker, 2009). Indikator ini sangat populer karena interpretasi dan pengukurannya mudah. Namun, indikator ini tidak memberi indikasi seberapa miskin penduduk miskin tersebut.

Konsep ketimpangan (*inequality*) lebih luas dari kemiskinan karena definisinya mencakup seluruh penduduk dan tidak hanya fokus pada penduduk miskin (Haughton dan Khandker, 2009). Ketimpangan juga merupakan ukuran kemiskinan relatif yang menggambarkan kondisi kemiskinan sebagai dampak kebijakan pembangunan yang tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan distribusi pendapatan tidak merata (BPS, 2008). Ukuran ketimpangan yang paling banyak digunakan adalah indeks Gini yang dikembangkan oleh Gini (1912), yang diturunkan dari

kurva Lorenz, yaitu kurva frekuensi kumulatif yang membandingkan distribusi variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi uniform yang menyatakan pemerataan atau *equality*. Indeks Gini berkisar antara 0 (merata sempurna) dan 1 (timpang sempurna). Namun, data empiris menunjukkan indeks Gini yang dihitung dari data pengeluaran per kapita berkisar antara 0,3 dan 0,5 (Haughton dan Khandker, 2009).

Banyak ahli ekonomi seperti Kakwani (1993) dan Bourguignon (2004) berpendapat bahwa perubahan kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga distribusi pendapatan. Pendapat tersebut dituangkan dalam konsep pertumbuhan *pro-poor* (*pro-poor growth*) yang populer sejak satu dekade terakhir. Konsep ini merefleksikan ide, yaitu pertumbuhan ekonomi harus dinikmati oleh

seluruh segmen masyarakat. Pendapat ini muncul berdasarkan hasil studi empiris di beberapa negara pada awal tahun 2000an yang menemukan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi yang cepat memberi efek paling besar dalam mengurangi kemiskinan, tetapi tidak semua pertumbuhan memberi pengaruh yang sama, sehingga percepatan pengentasan kemiskinan tidak hanya membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga ketimpangan pendapatan yang lebih rendah (Whitfield, 2008). Keterkaitan pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan juga dituangkan dalam kerangka pemikiran Warr (2006) di mana pertumbuhan ekonomi adalah dampak (*outcome*) dari kebijakan ekonomi dan kekuatan-kekuatan eksternal serta respons pelaku pasar. Kebijakan ekonomi dan faktor-faktor eksternal tersebut memengaruhi kemiskinan melalui efek-efeknya pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dan redistribusi pendapatan (*redistributional effects*) yang diasumsikan bernilai kecil. Pada kerangka pemikiran tersebut, PDB dan komponen-komponen sektoralnya merupakan dampak *intermediate*, sedangkan kemiskinan merupakan dampak susulan. Dengan demikian, perubahan tingkat kemiskinan juga dipengaruhi oleh perubahan ketimpangan pendapatan.

Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

Strategi penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui transfer pendapatan (*cash transfer*) dan strategi pertumbuhan yang memihak penduduk miskin (*pro-poor growth*) (De Janvry dan Sadoulet, 2010). Kebijakan transfer pendapatan memberi efek lebih cepat karena secara langsung berdampak meningkatkan pendapatan individual penduduk. Akan tetapi, kebijakan tersebut membutuhkan biaya besar dan program-program redistribusi yang tepat sehingga dipandang kurang bijak jika diterapkan pada penduduk miskin yang memi-

liki potensi bekerja. Kebijakan transfer pendapatan yang pernah diterapkan di Indonesia antara lain program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program beras untuk keluarga miskin (Raskin). Sedangkan strategi *pro-poor growth* memberi pengaruh tidak langsung. Menurut Abbott (2007), suatu kebijakan adalah *pro-poor* jika (1) bersifat padat karya; (2) sasaran pada sektor-sektor di mana penduduk miskin bekerja; (3) mampu menciptakan pendapatan dan pekerjaan bagi penduduk miskin; dan (4) mengurangi ketimpangan pendapatan. Kebijakan ini memberi pengaruh pada pendapatan penduduk miskin melalui efek pertumbuhan dan distribusi pendapatan. Dengan demikian, kebijakan *pro-poor growth* adalah kebijakan yang meningkatkan pertumbuhan sehingga berdampak menurunkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan (Kakwani dan Pernia, 2000). Akan tetapi, tidak semua pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang sama. Menurut Meier (1995), penyebabnya adalah (1) laju pertumbuhan ekonomi yang rendah; (2) pola pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang; dan (3) kegagalan kebijakan pemerintah.

Strategi *pro-poor growth* dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal. Peningkatan pajak nasional dan daerah untuk meningkatkan pendapatan fiskal daerah berpotensi meningkatkan belanja daerah. Peningkatan belanja daerah secara langsung meningkatkan *output* daerah dan secara tidak langsung meningkatkan pendapatan individual dan konsumsi masyarakat. Kebijakan fiskal di tingkat daerah dimungkinkan melalui kebijakan desentralisasi fiskal dengan melimpahkan sebagian kewenangan fiskal pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui tugas-tugas pendapatan (*revenue assignments*) dan tugas-tugas pengeluaran (*expenditure assignments*). Akan tetapi, implementasi kebijakan desentralisasi fiskal berdampak pada munculnya *trade-off* antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan.

Tabel 3: Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Ketimpangan Pendapatan Provinsi Tahun 2011

	Provinsi	Laju PDRB Riil ¹ (%)	Headcount Index (%)	Indeks Gini	Proporsi Penduduk Miskin Pertanian (%)
1	Nanggroe Aceh Darussalam	5,02	19,57	0,33	57,8
2	Sumater Utara	6,58	11,33	0,35	61,6
3	Sumatera Barat	6,22	9,04	0,35	70,3
4	Riau	5,01	8,47	0,36	63,9
5	Jambi	8,54	8,65	0,34	63,2
6	Sumatera Selatan	6,50	14,24	0,34	60,8
7	Bengkulu	6,40	17,50	0,36	65,7
8	Lampung	6,39	16,93	0,37	64,4
9	Kepulauan Bangka Belitung	6,40	5,75	0,30	26,2
10	Kepulauan Riau	6,67	7,40	0,32	9,5
11	DKI Jakarta	6,71	3,75	0,44	1,1
12	Jawa Barat	6,48	10,65	0,41	41,5
13	Jawa Tengah	6,01	15,76	0,38	50,9
14	D.I. Yogyakarta	5,16	16,08	0,40	54,5
15	Jawa Timur	7,22	14,23	0,37	60,5
16	Banten	6,43	6,32	0,40	40,7
17	Bali	6,49	4,20	0,41	49,1
18	Nusa Tenggara Barat	-3,18	19,73	0,36	56,9
19	Nusa Tenggara Timur	5,63	21,23	0,36	78,7
20	Kalimantan Barat	5,94	8,60	0,40	61,7
21	Kalimantan Tengah	6,74	6,56	0,34	73,2
22	Kalimantan Selatan	6,12	5,29	0,37	61,5
23	Kalimantan Timur	3,93	6,77	0,38	58,0
24	Sulawesi Utara	7,39	8,51	0,39	57,7
25	Sulawesi Tengah	9,16	15,83	0,38	65,7
26	Sulawesi Selatan	7,65	10,29	0,41	59,2
27	Sulawesi Tenggara	8,68	14,56	0,41	66,7
28	Gorontalo	7,68	18,75	0,46	75,9
29	Sulawesi Barat	10,41	13,89	0,34	85,4
30	Maluku	6,02	23,00	0,41	73,0
31	Maluku Utara	6,41	9,18	0,33	80,7
32	Papua Barat	27,22	31,92	0,40	83,6
33	Papua	-5,67	31,98	0,42	90,0

Catatan: ¹Perubahan PDRB Harga Konstan Tahun 2000;
Sumber: BPS, data diolah

Tabel 3 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat tahun 2011 paling tinggi (27,2%), tetapi angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan indeks Gini juga sangat tinggi yaitu 31,9% dan 0,40. Sementara itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pertumbuhan ekonomi paling rendah (6,4%) memiliki angka kemiskinan cukup rendah (5,8%) dan indeks Gini paling kecil (0,30). Sedangkan, Provinsi DKI Jakarta dengan pertumbuhan ekonomi 6,7% memiliki angka kemiskinan paling kecil (3,7%) dan indeks Gini

paling besar (0,44). Perbedaan pengaruh pertumbuhan ekonomi pada kemiskinan dan ketimpangan pendapatan provinsi pada masa desentralisasi fiskal yang mengutamakan instrumen transfer fiskal DAU memberi indikasi bahwa tidak semua penduduk miskin memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dengan perkataan lain, ada indikasi *trickle-up effect* dalam proses pembangunan nasional di Indonesia (Kuncoro, 2013). Kenyataan ini juga menunjukkan ada *trade-off* pertumbuhan dan ketimpangan pendapat-

an tingkat daerah di Indonesia. Dengan demikian, dapat diduga bahwa implementasi kebijakan desentralisasi fiskal yang mengutamakan transfer fiskal tidak memihak mayoritas penduduk miskin khususnya di sektor pertanian. Namun, hasil studi Son dan Kakwani (2004) menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat dapat memperlambat penurunan bahkan meningkatkan kemiskinan yang tergantung pada seberapa besar tingkat ketimpangan pendapatan meningkat. Jika pertumbuhan *pro-poor* (*pro-poor growth*) di mana pertumbuhan menurunkan ketimpangan pendapatan dapat dicapai, maka penurunan kemiskinan dapat dipercepat meskipun pertumbuhan ekonomi sedang (*moderate*). Artinya, pertumbuhan *pro-poor* meskipun moderat akan berdampak besar menurunkan kemiskinan dibandingkan tingkat pertumbuhan tinggi tetapi tidak *pro-poor*. Oleh karena itu, untuk mempercepat penurunan kemiskinan tidak hanya dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga pemerataan distribusi pendapatan.

Pelimpahan *expenditure assignments* yang menyebabkan belanja daerah melebihi kapasitas fiskal diatasi dengan transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Akan tetapi, beberapa studi empiris terdahulu menunjukkan dampak negatif transfer fiskal pada kemiskinan. Nanga (2006) menggunakan data empiris 25 provinsi di Indonesia tahun 1999–2002 yang menunjukkan transfer fiskal berdampak meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Studi Qiao *et al.* (2008) terhadap data empiris di Cina tahun 1985–1998 menemukan desentralisasi fiskal menyebabkan *trade-off* antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Pengaruh negatif transfer fiskal pada kemiskinan diduga karena tidak efektifnya distribusi dana transfer fiskal pada alokasi belanja-belanja daerah. Artinya, ada fenomena *flypaper effect* karena pemerintah daerah merespons peningkatan transfer fiskal secara berlebihan untuk belanja daerah khususnya dalam membiayai

kegiatan-kegiatan yang tidak strategis dalam mengentaskan kemiskinan. Fenomena *flypaper effect* di Indonesia antara lain ditunjukkan oleh studi-studi empiris Afrizawati (2012), Suyanto (2010), dan Kuncoro (2004). Oleh karena itu, dengan pemikiran bahwa pajak lebih berperan meredistribusi pendapatan, maka peningkatan kapasitas fiskal melalui pajak dan bagi hasil pajak dianggap lebih mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang *pro-poor*, yaitu pertumbuhan yang berdampak mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Pemikiran tersebut juga berdasarkan hasil studi empiris Amir *et al.* (2013), yaitu stimulus fiskal pemotongan PPh di Indonesia lebih menguntungkan penduduk golongan atas karena berdampak meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi memperburuk ketimpangan pendapatan.

Fakta tingginya ketergantungan keuangan daerah pada DAU dan adanya fenomena *flypaper effect* akibat keleluasan pengelolaan anggaran belanja daerah diduga memperburuk kondisi kemiskinan di Indonesia. Hal ini membawa pada suatu pemikiran mengenai pentingnya pemerintah daerah meningkatkan kemampuan keuangannya dari sumber daya lokal, yaitu kapasitas fiskal. Studi-studi empiris terdahulu umumnya menganalisis dampak kebijakan desentralisasi fiskal dalam konteks transfer fiskal DAU dan desentralisasi pengeluaran, antara lain Sinaga dan Siregar (2003), Yudhoyono (2004), Pardede (2004), Panjaitan (2006), dan Nanga (2006). Selain itu, referensi mengenai studi-studi empiris yang menganalisis dampak kapasitas fiskal terhadap kemiskinan sektoral sangat terbatas. Studi-studi kemiskinan sektoral umumnya hanya menganalisis keterkaitan perekonomian dan kemiskinan sektoral, tetapi tidak terkait peran kebijakan fiskal daerah, antara lain Suryahadi *et al.* (2009; 2012), Ravallion dan Datt (2002), serta Eastwood dan Lipton (2001). Sedangkan fakta menunjukkan ada variasi sektoral regional dalam dinamika kemiskinan di Indonesia dalam kerangka de-

sentralisasi fiskal. Dengan perkataan lain, kebijakan fiskal daerah berperan dalam perubahan kemiskinan sektoral di Indonesia.

Kerangka Pemikiran

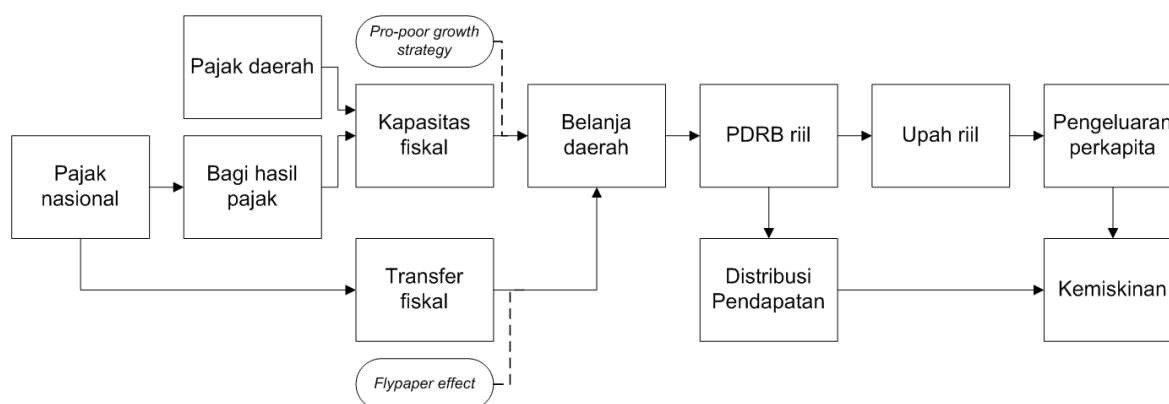
Kerangka pemikiran disusun berdasarkan tinjauan literatur terhadap teori, bukti-bukti empiris, dan hasil-hasil studi terdahulu. Gambar 3 menunjukkan pajak nasional dan pajak daerah berperan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Dengan asumsi bahwa kapasitas fiskal digunakan untuk belanja-belanja daerah yang sesuai dengan strategi pengentasan kemiskinan (*pro-poor growth strategy*), maka peningkatan belanja-belanja daerah karena naiknya kapasitas fiskal berdampak meningkatkan PDRB riil. Strategi *pro-poor growth* dapat dilakukan dengan menerapkan kebijakan-kebijakan di bidang infrastruktur, pertanian, pengembangan modal manusia, dan akses teknologi (Balisacan *et al.*, 2003; OECD, 2006a; 2006b; 2009a; 2009b).

Peningkatan PDRB riil selanjutnya akan meningkatkan upah riil. Selama tahun 2005–2011, rata-rata kenaikan upah riil tenaga kerja pertanian, industri pengolahan, serta perdagangan, hotel, dan restoran di tingkat provinsi masing-masing 9,8%, 0,3%, dan 2,6%. Indikator upah riil dipilih karena dianggap lebih mampu menggambarkan daya beli tenaga kerja sehingga dapat digunakan sebagai proksi tingkat pendapatan penduduk. Peningkatan pendapatan penduduk karena peningkatan upah riil akan meningkatkan daya beli sehingga pengeluaran konsumsi meningkat. Dengan menggunakan penghitungan angka kemiskinan dengan konsep kemiskinan pendapatan (*income poverty*), maka peningkatan pengeluaran per kapita akan mengurangi angka kemiskinan. Di sisi lain, pajak nasional juga merupakan sumber dana transfer yang dialokasikan untuk mengatasi kesenjangan fiskal akibat belanja daerah yang melebihi kapasitas fiskal. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa dana transfer kepada pemerintah daerah melalui dana per-

imbangan bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Penerimaan perpajakan merupakan sumber utama pendapatan dalam negeri terutama pajak-pajak langsung seperti PPh, PBB, dan BPHTB. Akan tetapi, *flypaper effect* dapat mengurangi dampak transfer fiskal pada kemiskinan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas fiskal khususnya melalui pajak daerah dan bagi hasil pajak dianggap lebih mampu mengurangi kemiskinan melalui efek pertumbuhan dan distribusi pendapatan.

Metode

Studi ini menggunakan data sekunder dari Kementerian Keuangan RI dan BPS berupa data panel 23 provinsi dan 391 kabupaten/kota tahun 2005–2011 meliputi data realisasi fiskal, data perekonomian, dan data kemiskinan. Data fiskal terdiri dari pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah tingkat provinsi yang digabung dengan data semua kabupaten/kota di setiap provinsi. Konsep dan penghitungan pendapatan daerah mengacu pada UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat 2. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis-jenis pajak daerah mayoritas merupakan pajak tidak langsung yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah. Pajak daerah meliputi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak pene-

Gambar 3: Kerangka Pemikiran

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

rangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB, dan BPHTB. Sampai saat ini, PBB masih dikelola oleh pemerintah pusat dan direncanakan akan dialihkan ke pemerintah daerah pada tahun 2015. Sedangkan BPHTB sudah dialihkan ke pemerintah daerah sejak tahun 2011. Tarif pajak untuk setiap jenis pajak berbeda-beda yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dana perimbangan adalah transfer fiskal yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan meliputi DAU, DAK, bagi hasil pajak, dan bagi hasil sumber daya alam. Bagi hasil pajak bersumber dari penerimaan pajak dalam negeri dari PPh, PBB, dan BPHTB yang dikelola oleh pemerintah pusat. Kapasitas fiskal merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil sumber daya alam yang digunakan sebagai dasar penghitungan celah fiskal dalam formula DAU.

Sedangkan, konsep belanja daerah mengacu pada UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Perubahan format keuangan negara dan daerah menyebabkan belanja daerah tidak

lagi dipisahkan menjadi belanja rutin dan belanja pembangunan, melainkan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kedua jenis belanja ini dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Agar sesuai dengan tujuan studi maka klasifikasi yang digunakan berdasarkan fungsi ekonomi dalam format Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu (1) belanja pertanian untuk tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan; (2) belanja kehutanan; (3) belanja kelautan dan perikanan; (4) belanja industri; (5) belanja perdagangan; (6) belanja pekerjaan umum; (7) dan belanja lainnya. Dalam studi ini, belanja pekerjaan umum dianggap dapat mewakili pengeluaran daerah untuk infrastruktur jalan.

Data perekonomian meliputi PDRB sektoral, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan, jumlah tenaga kerja, rata-rata upah tenaga kerja per bulan, laju inflasi, dan infrastruktur panjang jalan aspal. Data PDRB sektoral diklasifikasikan menjadi: (1) sektor pertanian; (2) sektor industri pengolahan; (3) sektor perdagangan, hotel, dan restoran; dan (4) sektor-sektor lainnya. PDRB sektor pertanian diklasifikasikan lagi menjadi tiga subsektor: (1) tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan; (2) kehutanan; dan (3) perikanan. PDRB sektor industri pengolahan meliputi subsektor

agroindustri dan subsektor industri pengolahan lainnya. PDRB subsektor agroindustri terdiri dari: (1) industri makanan, minuman, dan tembakau; (2) industri barang kayu dan hasil hutan lain; dan (3) agroindustri lainnya. Untuk efisiensi penulisan, istilah sektor industri pengolahan disingkat menjadi sektor industri, sedangkan sektor perdagangan, hotel, dan restoran disingkat menjadi sektor perdagangan. PDRB sektor pertanian terdiri dari gabungan subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, dan subsektor pertanian lainnya, yaitu gabungan subsektor kehutanan dan subsektor perikanan. Data rata-rata pengeluaran per kapita per bulan diklasifikasikan menurut kelompok rumah tangga berdasarkan pekerjaan utama kepala rumah tangga yaitu: (1) rumah tangga pertanian; (2) rumah tangga industri; dan (3) rumah tangga perdagangan. Sedangkan kelompok rumah tangga lainnya tidak dianalisis. Sesuai konsep Sakernas, pekerjaan utama kepala rumah tangga merujuk pada jumlah jam kerja terbanyak yang dilakukan oleh kepala rumah tangga dalam masa satu minggu sebelum pencacahan (renumerasi). Karena data rata-rata pengeluaran per kapita per bulan tingkat provinsi tidak tersedia, maka dihitung oleh penulis menggunakan data Susenas. Jumlah tenaga kerja dan rata-rata upah tenaga kerja per bulan juga diklasifikasikan menurut tiga sektor utama tersebut. Agar terbanding antartahun, data-data nominal diubah ke dalam bentuk riil menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) provinsi. Karena data IHK provinsi tidak tersedia, maka dihitung sebagai rata-rata IHK umum beberapa kota di setiap provinsi dengan tahun dasar 2007 (2007=100). Saat ini, IHK tersedia untuk 66 kota yang tersebar di semua provinsi. Selanjutnya, data riil diperoleh dengan membagi masing-masing data nominal dengan rata-rata IHK provinsi. Demikian juga, laju inflasi provinsi yang digunakan sebagai variabel penjelas dalam persamaan rata-rata pengeluaran per kapita dihitung dari perubahan rata-rata

IHK provinsi setiap tahun. Kondisi infrastruktur diwakili oleh data panjang jalan aspal di setiap provinsi yang merupakan gabungan jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota yang melewati provinsi tersebut.

Data kemiskinan meliputi persentase penduduk miskin dalam ukuran *Headcount Index* dan ketimpangan pendapatan dalam ukuran indeks Gini. Serupa dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan, angka kemiskinan *Headcount Index* di setiap provinsi dirinci menurut tiga kelompok rumah tangga, yaitu pertanian, industri, dan perdagangan. Angka kemiskinan tingkat provinsi yang didisagregasi menurut kelompok rumah tangga tidak tersedia, sehingga dihitung oleh penulis menggunakan data Susenas. Sedangkan indeks Gini merupakan data ketimpangan pendapatan tingkat provinsi dan tidak dirinci menurut kelompok rumah tangga.

Model Persamaan Simultan

Model persamaan simultan dinamis merupakan model ekonometrik yang disusun berdasarkan kerangka pemikiran menggunakan variabel-variabel yang relevan dalam tataran teori ekonomi, konsep, dan kajian studi-studi empiris terdahulu. Spesifikasi model ekonometrik tersebut terdiri dari beberapa persamaan struktural dan identitas yang dikelompokkan ke dalam blok fiskal, perekonomian, dan kemiskinan. Keterkaitan antarblok disajikan pada Gambar 4. Sumber-sumber pendapatan fiskal daerah terdiri dari pajak daerah, bagi hasil pajak, DAU, dan sumber-sumber lainnya akan memengaruhi belanja-belanja daerah untuk urusan pertanian, industri, perdagangan, infrastruktur, dan lainnya. Perubahan pendapatan dan belanja fiskal daerah selanjutnya akan mengubah kinerja fiskal daerah yang menggambarkan tingkat ketergantungan fiskal dengan ukuran kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan kemandirian fiskal (*fiscal autonomy*). Kesenjangan fiskal dihitung dari selisih total belanja daerah dan kapasitas fiskal, sedangkan kemandirian fiskal dihitung dari rasio PAD ter-

hadap total belanja daerah. Belanja infrastruktur memengaruhi kondisi infrastruktur panjang jalan aspal yang selanjutnya memengaruhi jumlah tenaga kerja sektoral. Jumlah tenaga kerja dan belanja daerah serta faktor-faktor eksternal lainnya bersama-sama memengaruhi PDRB sektoral. Perubahan PDRB sektoral akan mengubah tingkat upah riil tenaga kerja sektoral sehingga tingkat pendapatan rumah tangga juga berubah. Peningkatan pendapatan rumah tangga sebagai dampak peningkatan PDRB sektoral akan meningkatkan daya beli penduduk sehingga pengeluaran per kapita meningkat. Di sisi lain, pertumbuhan PDRB sektoral dan kesenjangan fiskal memengaruhi distribusi pendapatan. Peningkatan pengeluaran per kapita bersama-sama dengan turunnya ketimpangan pendapatan akan mengurangi kemiskinan di setiap kelompok rumah tangga. Fenomena *flypaper effect* dapat dibuktikan pada estimasi persamaan-persamaan belanja daerah melalui nilai elastisitas belanja daerah terhadap transfer fiskal dan kapasitas fiskal. Jika elastisitas belanja daerah untuk sektor-sektor yang esensial dalam mengentaskan kemiskinan (seperti pertanian dan infrastruktur) terhadap kapasitas lebih besar dibandingkan transfer fiskal, maka kapasitas fiskal menjadi lebih efektif dalam menurunkan kemiskinan.

Hasil dan Analisis

Model persamaan simultan dinamis diestimasi dengan metode *Two Stage Least Squares* (2SLS) menggunakan prosedur SYSLIN pada *software SAS/ETS 9.3.1*. Metode 2SLS dipilih dengan pertimbangan jumlah sampel terbatas, respesifikasi berulang, melakukan simulasi kebijakan, hasil estimasi konsisten, sederhana, dan mudah (Koutsoyiannis, 1977).

Analisis Hasil Estimasi

Secara umum, hasil estimasi menunjukkan model memenuhi kriteria ekonomi (*theoretically meaningful*) dan kriteria statistik (*goodness of*

fit). Penerimaan pajak daerah dan bagi hasil pajak dipengaruhi oleh PDRB sektor-sektor nonpertanian. Sedangkan DAU antara lain dipengaruhi oleh total PDRB dan jumlah pegawai negeri sipil (PNS). PDRB yang lebih besar akan menurunkan DAU, sebaliknya jumlah PNS yang lebih banyak akan meningkatkan DAU. Akan tetapi, perubahan DAU yang sangat responsif terhadap perubahan jumlah PNS dengan elastisitas jangka pendek 0,90 dan jangka panjang 1,00 mengindikasikan besaran DAU lebih dipengaruhi oleh belanja rutin untuk administrasi pemerintahan daerah. Artinya, formula penghitungan DAU lebih mengutamakan alokasi dasar daripada kebutuhan fiskal daerah. Hal ini sesuai dengan temuan *World Bank* (2007).

Estimasi persamaan-persamaan belanja daerah yang menunjukkan elastisitas belanja industri dan belanja perdagangan terhadap DAU yang lebih besar daripada kapasitas fiskal mengindikasikan adanya fenomena *flypaper effect* (Tabel 4). Sebaliknya, nilai koefisien estimasi dan elastisitas belanja pertanian, belanja kehutanan, dan belanja infrastruktur terhadap kapasitas fiskal lebih besar daripada DAU. Artinya, dalam strategi pengentasan kemiskinan melalui bidang-bidang pertanian dan infrastruktur sesuai rekomendasi Bali-sacan *et al.* (2003) dan OECD (2006a; 2006b; 2009a; 2009b), pemerintah daerah lebih bergantung pada penerimaan kapasitas fiskal daripada transfer DAU. Sedangkan, penerimaan DAU lebih diutamakan untuk bidang-bidang industri dan perdagangan yang tidak termasuk strategi *pro-poor growth*.

Hasil estimasi persamaan-persamaan upah tenaga kerja pada Tabel 5 menunjukkan PDRB sektoral secara positif signifikan memengaruhi rata-rata upah riil tenaga kerja sektoral selain pengaruh upah minimum provinsi (UMP) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Selanjutnya, rata-rata upah riil tenaga kerja sektoral secara signifikan positif memengaruhi rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di se-

Tabel 4: Estimasi Belanja Daerah

Variabel Penjelas	GPGNKBNTNK	GHTN	GIKAN	GIND	GDG	GIFR
KAPFIS	0,02254*** (0,35; 0,42)	0,00231** (0,12; 0,28)	0,00490*** (0,23; 0,31)	0,00113*** (0,14; 0,27)	0,00262*** (0,27; 0,43)	0,15784*** (0,42; 0,59)
DAU	0,01696*** (0,35; 0,41)	0,00162* (0,11; 0,25)	0,00581*** (0,35; 0,48)	0,00360*** (0,58; 1,13)	0,00338*** (0,45; 0,72)	0,03462*** (0,12; 0,17)
SHPDRBPG- NKBNTNK	6.528,027*** (0,41; 0,49)					
SHPDRBHTN		10.671,05*** (0,17; 0,40)				
SHPDRBIKAN			6.853,992*** (0,24; 0,32)			
TREND	7.221,881**	-7.194,11***	3.733,271***	2.187,757***	1.562,678	14.655,59
GPGNKBNTNKL	0,1582***					
GHTNL		0,581428***				
GIKANL			0,258131***			
GINDL				0,487461***		
GDGL					0,372991***	
GIFRL						0,294207***

Keterangan: * Signifikan pada taraf 10%;

** Signifikan pada taraf 5%;

*** Signifikan pada taraf 1%;

Angka dalam tanda kurung adalah elastisitas jangka pendek dan jangka panjang;

Keterangan variabel disajikan pada Tabel 9.

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

mua kelompok rumah tangga (Tabel 6). Artinya, peningkatan upah riil akan meningkatkan daya beli penduduk sehingga pengeluaran untuk konsumsi meningkat. Sebaliknya, laju inflasi provinsi menurunkan rata-rata pengeluaran per kapita. Rata-rata pengeluaran per kapita secara signifikan negatif memengaruhi tingkat kemiskinan dalam ukuran *Headcount Index* di setiap kelompok rumah tangga (Tabel 7). Sementara itu, meskipun pengaruh indeks Gini tidak signifikan, tetapi ada indikasi penurunan ketimpangan pendapatan akan menurunkan angka kemiskinan. Hasil estimasi juga menunjukkan perubahan *Headcount Index* di ketiga sektor sangat elastis terhadap perubahan pengeluaran per kapita. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perubahan tingkat kemiskinan lebih responsif terhadap perubahan pengeluaran per kapita yang dipengaruhi oleh upah riil. Indikator pengeluaran per kapita dari hasil survei rumah tangga banyak digunakan pada studi-studi terdahulu terkait kemiskinan antara lain Miranti (2010) serta Ravallion dan

Chen (1997) dengan alasan pengeluaran per kapita lebih mencerminkan kesejahteraan daripada pendapatan meskipun berasal dari sumber data yang sama (Ravallion, 1995).

Analisis Hasil Simulasi

Simulasi kebijakan diawali dengan validasi model untuk menguji kelayakan model sebagai alat simulasi alternatif kebijakan. Secara teoritis, simulasi kebijakan bertujuan untuk menganalisis dampak alternatif kebijakan melalui skenario kebijakan dengan cara mengubah nilai variabel atau instrumen kebijakannya. Oleh karena itu, proses simulasi merupakan proses penentuan prediksi nilai-nilai variabel endogen dengan cara substitusi hasil estimasi koefisien regresi variabel penjelas dan nilai-nilai aktualnya ke dalam model regresi yang berkaitan dengan variabel endogen dalam proses ramalan (*forecasting*). Tujuan simulasi atau peramalan tersebut dapat dibedakan menurut horison waktu, yaitu *ex post forecasting*, *ex ante fore-*

Tabel 5: Estimasi Jumlah dan Upah Tenaga Kerja

Variabel Penjelas	TKTANI	TKIND	TKDG	UPHTANI	UPHIND	UPHDG
UPHTANI	-1,023*** (-0,37; -0,47)					
UPHIND		-0,473*** (-0,80; -1,21)				
UPHDG			-0,092 (-0,09; -0,15)			
ASP	0,109*** (0,63; 0,80)	0,009** (0,17; 0,25)	0,023* (0,27; 0,44)			
UMP				0,222914** (0,25; 0,65)	0,298141* (0,23; 0,51)	0,215499** (0,18; 0,30)
MYS				31,68062* (0,42; 1,08)	100,5949*** (0,90; 2,02)	74,59768*** (0,71; 1,23)
PDRBTANI	0,000024*** (0,34; 0,43)					
PDRBTANIKAP				0,024895*** (0,13; 0,33)		
PDRBIND		9,25X10 ⁻⁶ *** (0,67; 1,01)			5,57E-07* (0,02; 0,05)	
PDRBDG			0,000014*** (0,43; 0,71)			4,49E-07* (0,01; 0,02)
TKTANIL	0,213***					
TKINDL		0,335***				
TKDGL			0,396***			
UPHTANIL				0,616647***		
UPHINDL					0,556614***	
UPHDGL						0,421055***

Keterangan: * Signifikan pada taraf 10%;

** Signifikan pada taraf 5%;

*** Signifikan pada taraf 1%;

Angka dalam tanda kurung adalah elastisitas jangka pendek dan jangka panjang;

Keterangan variabel disajikan pada Tabel 9.

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

casting, dan *backcasting* (Pindyck dan Rubinfeld, 1991). Pada studi ini dilakukan simulasi kebijakan *ex ante forecasting* berupa simulasi dinamik dasar periode historis tahun 2006-2011. Validasi model dilakukan dengan perangkat lunak *Statistical Analysis System/Econometrics and Time Series Analysis (SAS/ETS)* versi 9.3.1 menggunakan prosedur SIMNLIN dan metode solusi NEWTON. Berdasarkan beberapa kriteria statistik seperti *Root Mean Squares Error (RMSE)*, *Root Mean Squares Percentage Error (RMSPE)*, dan *Theil's Inequality Coefficient (U)* (Pindyck dan Rubinfeld, 1991) hasil validasi menunjukkan nilai prediksi setiap variabel endogen relatif tidak menyimpang dari nilai aktualnya sehingga model dapat diguna-

kan sebagai alat simulasi alternatif kebijakan.

Simulasi kebijakan historis dinamik dilakukan dengan mengubah instrumen fiskal pajak daerah, bagi hasil pajak, dan DAU secara tunggal (*single policy*) dan kombinasi (*mix policy*) dalam empat skenario kebijakan. Besaran perubahan ditentukan dengan mempertimbangkan rata-rata perubahan aktual tahun 2005–2011 (dalam persentase dan nominal) dan tujuan studi. Perubahan nominal dijadikan bahan pertimbangan agar dampak kapasitas fiskal dan transfer fiskal dapat terbanding. Data studi menunjukkan penerimaan pajak daerah, bagi hasil pajak, dan DAU rata-rata meningkat 14%, 4%, dan 10%. Dengan hipotesis peningkatan kapasitas fiskal berdampak positif

Tabel 6: Estimasi Pengeluaran Per Kapita

Variabel Penjelas	EXPTANI	EXPIND	EXPDG
UPHTANI	0,155*** (0,33)		0,178341** (0,22)
UPHIND		0,149264*** (0,34)	
UPHDG	0,153*** (0,44)	0,21556** (0,45)	0,304506*** (0,52)
IFL	-10,2641*** (-0,30)	-10,1153*** (-0,22)	-18,2697*** (-0,32)

Keterangan: *** Signifikan pada taraf 1%;

** Signifikan pada taraf 5%;

Angka dalam tanda kurung adalah elastisitas jangka pendek dan jangka panjang;

Keterangan variabel disajikan pada Tabel 9.

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

dibandingkan peningkatan transfer fiskal, maka cukup relevan melakukan simulasi peningkatan pajak daerah, bagi hasil pajak, dan DAU masing-masing 20%, 10%, dan 5%. Skenario peningkatan pajak daerah dapat dilakukan dengan upaya-upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Upaya-upaya ekstensifikasi pajak antara lain meningkatkan jumlah wajib pajak dan memperluas objek pajak melalui *canvassing* (penyisiran wajib pajak), pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Sensus Pajak Nasional. Sedangkan, upaya-upaya intensifikasi pajak dilakukan untuk mengoptimalkan penggalan penerimaan pajak terhadap objek pajak dan subjek pajak yang telah tercatat, salah satunya dengan meningkatkan kemampuan aparatur perpajakan di daerah.

Dampak masing-masing skenario simulasi kebijakan yang disajikan pada Tabel 8 dianalisis menggunakan 22 variabel endogen yang dianggap mampu menggambarkan kondisi kemiskinan di setiap kelompok rumah tangga, kinerja perekonomian daerah, dan kinerja fiskal daerah. Analisis hasil dirinci sebagai berikut:

S1: Pajak daerah naik 20% (nilai nominal setara S3 (kenaikan DAU 5%))

- Peningkatan pajak daerah 20% atau rata-

rata Rp293,0 miliar per provinsi per tahun meningkatkan kapasitas fiskal sehingga kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) berkurang 2,63% dan kemandirian fiskal (*fiscal autonomy*) meningkat 1,24% poin.

- Peningkatan pendapatan fiskal karena peningkatan penerimaan pajak daerah menyebabkan peningkatan belanja daerah sehingga PDRB meningkat 1,03%.
- Peningkatan PDRB sektoral meningkatkan upah riil tenaga kerja sektoral dengan peningkatan terbesar pada upah tenaga kerja pertanian sebesar 0,43% akibat kenaikan PDRB pertanian 1,60%. Sementara itu, meskipun PDRB perdagangan naik 1,94%, tetapi upah perdagangan hanya naik 0,05% karena perubahan upah perdagangan tidak elastis terhadap perubahan PDRB perdagangan sebagaimana ditunjukkan pada hasil estimasi di Tabel 5.
- Meningkatnya upah riil menyebabkan kenaikan rata-rata pengeluaran per kapita di setiap kelompok rumah tangga terutama kelompok rumah tangga pertanian (0,18%).
- Indeks Gini turun 0,002 poin yang disebabkan kenaikan pertumbuhan PDRB industri dan turunnya kesenjangan fiskal. Sebagaimana diketahui dari hasil estimasi pada Tabel 7, indeks Gini secara signi-

Tabel 7: Estimasi Pengeluaran Per Kapita

Variabel Penjelas	GINI	POVTANIP0	POVINDP0	POVDGP0
PDRBINDGR	-0,00005*** (-0,01; -0,02)			
PDRDDGGR	0,000108*** (0,01; 0,01)			
TKTANI	-7,95X10 ⁻⁶ *** (-0,04; -0,09)			
FISGAP	2,722X10 ⁻⁹ *** (0,06; 0,14)			
GINIL	0,58892***			
EXPTANI		-0,03799*** (-0,55; -1,17)		
EXPIND			-0,03551*** (-1,14; -1,44)	
EXPDG				-0,02068*** (-1,27; -1,41)
GINI		14,50618 (0,25; 0,53)	1,432822 (0,04; 0,05)	10,4788 (0,45; 0,50)
ASP		-0,00004 (-0,02; -0,04)	-0,00006 (-0,05; -0,06)	-0,00009 (-0,11; -0,12)
POVTANIP0L		0,527365***		
POVINDP0L			0,203775***	
POVDGP0L				0,096828

Keterangan: *** Signifikan pada taraf 1%;

Angka dalam tanda kurung adalah elastisitas jangka pendek dan jangka panjang;

Keterangan variabel disajikan pada Tabel 9.

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

fikan negatif dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB industri dan jumlah tenaga kerja pertanian, tetapi secara signifikan positif dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB perdagangan dan kesenjangan fiskal. Dengan kata lain, untuk menurunkan ketimpangan pendapatan, maka PDRB industri harus tumbuh lebih besar dan penyerapan tenaga kerja pertanian harus meningkat. Sebaliknya, pertumbuhan PDRB perdagangan yang lebih cepat dan kesenjangan fiskal yang lebih besar akan meningkatkan ketimpangan pendapatan.

- Pengeluaran per kapita yang lebih besar bersama-sama dengan indeks Gini yang lebih rendah berdampak menurunkan *head-count index* di semua kelompok rumah tangga dengan penurunan terbesar pada rumah tangga pertanian sebesar 0,12% poin.

- Ringkasan: peningkatan kapasitas fiskal melalui peningkatan pajak daerah 20% berdampak menurunkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang memihak rumah tangga miskin pertanian.

S2: Pajak daerah naik 20% dan bagi hasil pajak naik 10% (nilai nominal setara S4 (kenaikan DAU 5% dan bagi hasil pajak 10%))

- Kombinasi peningkatan pajak daerah 20% dan bagi hasil pajak 10% atau rata-rata Rp403,4 miliar per provinsi per tahun meningkatkan kapasitas fiskal sehingga kesenjangan fiskal berkurang 3,37% dan kemandirian fiskal meningkat 1,23% poin.
- Peningkatan pendapatan fiskal menyebabkan belanja daerah meningkat dan berdampak pada meningkatnya PDRB sebesar 1,52%.
- Peningkatan PDRB sektoral meningkat-

Tabel 8: Estimasi Pengeluaran Per Kapita

Variabel Endogen	Nilai Dasar	Satuan	Perubahan (%)			
			S1	S2	S3	S4
1. FISGAP	7,1	Triliun Rp	-2,63	-3,37	0,85	0,15
2. FISAUTO*	16,03	%	1,24	1,23	0,09	0,12
3. PDRBTANI	33,50	Triliun Rp	1,6	2,65	-1,48	-0,4
4. PDRBIND	41,70	Triliun Rp	1,15	1,59	2,26	2,72
5. PDRBINDGR*	15,30	%	-0,17	-1,30	9,14	10,35
6. PDRBDG	29,50	Triliun Rp	1,94	2,67	3,40	4,16
7. PDRBDGGR*	19,50	%	-1,95	-25,32	-7,72	-9,08
8. PDRB	154,40	Triliun Rp	1,03	1,52	0,94	1,44
9. TKTANI	1.738	Ribu orang	1,52	2,07	1	1,57
10. TKIND	565	Ribu orang	1,36	1,86	2,39	2,90
11. TKDG	940	Ribu orang	1,83	2,50	2,82	3,51
12. TK	4.324	Ribu orang	1,19	1,62	1,33	1,77
13. UPHTANI	814	Ribu Rp	0,43	1,02	-1,92	-1,33
14. UPHIND	902	Ribu Rp	0,07	0,09	0,13	0,16
15. UPHDG	835	Ribu Rp	0,05	0,07	0,10	0,11
16. EXPTANI	325	Ribu Rp	0,18	0,40	-0,71	-0,49
17. EXPIND	400	Ribu Rp	0,05	0,07	0,10	0,10
18. EXPDG	532	Ribu Rp	0,15	0,32	-0,47	-0,30
19. GINI*	0,34		-0,002	-0,009	-0,003	-0,004
20. POVTANIP0*	16,61	%	-0,12	-0,39	0,08	-0,01
21. POVINDP0*	11,66	%	-0,02	-0,04	-0,03	-0,04
22. POVDGP0*	6,67	%	-0,05	-0,15	0,01	-0,02

Ketrangan: *** Signifikan pada taraf 1%;

Angka dalam tanda kurung adalah elastisitas jangka pendek dan jangka panjang;

Keterangan variabel disajikan pada Tabel 9.

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

kan upah riil tenaga kerja sektoral dengan peningkatan terbesar pada upah tenaga kerja pertanian (1,02%).

- Peningkatan upah riil meningkatkan rata-rata pengeluaran per kapita di setiap kelompok rumah tangga terutama kelompok rumah tangga pertanian (0,40%).
- Indeks Gini turun 0,009 poin yang lebih disebabkan turunnya kesenjangan fiskal 3,37%.
- Peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita bersama-sama dengan turunnya indeks Gini berdampak menurunkan *headcount index* di semua kelompok rumah tangga dengan penurunan terbesar pada rumah tangga pertanian sebesar 0,39% poin.
- Ringkasan: peningkatan kapasitas fiskal berupa kombinasi peningkatan pajak daerah 20% dan bagi hasil pajak 10% berdampak menurunkan kemiskinan dan ke-

timpangan pendapatan yang memihak kelompok rumah tangga miskin pertanian. Hasil simulasi skenario S2 lebih baik dibandingkan skenario S1 karena perubahan pada mayoritas variabel endogen lebih besar.

S3: Dana Alokasi Umum naik 5%

- Peningkatan komponen transfer DAU 5% atau lebih kecil dari rata-rata peningkatan aktual per tahun (10%) dengan rata-rata nominal Rp279,1 miliar per provinsi per tahun meningkatkan transfer fiskal sehingga kesenjangan fiskal meningkat 0,85%.
- Peningkatan pendapatan fiskal menyebabkan belanja daerah meningkat dan berdampak meningkatkan PDRB 0,94% sehingga PAD meningkat dan menyebabkan kemandirian fiskal naik 0,09% poin.
- Indeks Gini turun 0,003 poin yang lebih

disebabkan naiknya pertumbuhan PDRB industri 9,14% poin dan turunnya pertumbuhan PDRB perdagangan 7,72% poin meskipun kesenjangan fiskal sedikit meningkat sebesar 0,85%.

- Meskipun total PDRB meningkat tetapi PDRB pertanian turun sehingga upah riil pertanian turun 1,92%. Hal ini menyebabkan pengeluaran per kapita pertanian turun 0,71% sehingga *headcount index* pertanian naik 0,08% poin meskipun indeks Gini berkurang. Hal ini dapat terjadi karena perubahan *headcount index* sektoral lebih elastis terhadap perubahan pengeluaran per kapita daripada perubahan indeks Gini.
- Turunnya PDRB pertanian berdampak pada turunnya pengeluaran per kapita perdagangan meskipun PDRB perdagangan meningkat. Hal ini dapat terjadi karena sesuai hasil estimasi pada Tabel 6 diketahui pengeluaran per kapita perdagangan secara signifikan positif tidak hanya dipengaruhi upah perdagangan, tetapi juga dipengaruhi upah pertanian sebagai sumber mata pencaharian tambahan dari kepala rumah tangga dan/atau anggota rumah tangga lainnya di rumah tangga perdagangan. Turunnya pengeluaran per kapita perdagangan selanjutnya berdampak meningkatkan *headcount index* perdagangan meskipun indeks Gini turun. Hal ini dapat terjadi karena hubungan *headcount index* perdagangan dan pengeluaran per kapita perdagangan sangat elastis sementara hubungannya dengan indeks Gini tidak elastis.
- Ringkasan: peningkatan transfer fiskal DAU 5% berdampak negatif karena meningkatkan kemiskinan terutama di kelompok rumah tangga pertanian. Jika dibandingkan hasil simulasi S1 yang perubahan nilai nominalnya setara, maka dampak peningkatan pajak daerah 20% (S1) lebih baik dibandingkan peningkatan DAU 5%

(S2). Artinya, upaya peningkatan pendapatan daerah dari sumber daya lokal lebih berdampak positif dibandingkan transfer fiskal.

S4: Dana Alokasi Umum naik 5% dan bagi hasil pajak naik 10%

- Kombinasi peningkatan DAU 5% dan bagi hasil pajak 10% atau rata-rata Rp389,4 miliar per provinsi per tahun meningkatkan transfer fiskal sehingga kesenjangan fiskal naik 0,15%.
- Peningkatan pendapatan fiskal dari DAU menyebabkan belanja daerah meningkat sehingga berdampak meningkatkan PDRB 1,44%. Kenaikan PDRB menyebabkan PAD naik sehingga kemandirian fiskal naik 0,12% poin.
- Meskipun total PDRB meningkat tetapi PDRB pertanian turun 0,40% sehingga upah riil pertanian turun 1,33% dan menyebabkan pengeluaran per kapita pertanian turun 0,49%.
- Meningkatnya pertumbuhan PDRB industri dan jumlah tenaga kerja pertanian menyebabkan indeks Gini berkurang. Kenaikan jumlah tenaga kerja pertanian dapat terjadi karena variabel tersebut secara signifikan negatif dipengaruhi upah riil pertanian sesuai teori keseimbangan dalam pasar tenaga kerja sebagaimana ditunjukkan dari hasil estimasi pada Tabel 5. Dengan demikian, upah riil pertanian yang lebih rendah meningkatkan jumlah tenaga kerja pertanian. Indeks Gini yang lebih rendah tersebut menyebabkan berkurangnya *headcount index* di ketiga sektor meskipun pengeluaran per kapita pertanian dan perdagangan turun. Namun, penurunan *headcount index* terbesar terjadi di kelompok rumah tangga industri yang dipengaruhi oleh meningkatnya pengeluaran per kapita industri.
- Ringkasan: kombinasi kebijakan peningkatan transfer fiskal DAU 5% dan bagi hasil pajak 10% berdampak menurunkan ke-

iskinan, tetapi tidak memihak kelompok rumah tangga pertanian. Jika dibandingkan hasil simulasi S2 dengan perubahan nilai nominal yang setara, dampak skenario S2 (kombinasi peningkatan pajak daerah 20% dan bagi hasil pajak 10%) lebih baik dibandingkan skenario S4, tetapi dampak skenario S4 masih lebih baik dibandingkan skenario S3 (peningkatan DAU 5%) karena adanya pengaruh bagi hasil pajak yang positif.

Dengan demikian, hasil simulasi menunjukkan kebijakan kapasitas fiskal melalui mekanisme perpajakan dengan meningkatkan penerimaan pajak daerah 20% dan bagi hasil pajak 10% (lebih tinggi dibandingkan rata-rata aktual) berdampak paling baik dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kinerja fiskal daerah serta memihak mayoritas penduduk miskin, yaitu di kelompok rumah tangga pertanian. Sedangkan, kebijakan transfer fiskal terutama dengan meningkatkan DAU 5% (lebih rendah dibandingkan rata-rata aktual) berdampak memperburuk kemiskinan dan kinerja fiskal daerah. Jenis DAU yang bersifat *block grant* dan besarnya sangat dipengaruhi oleh belanja pegawai atau administrasi pemerintahan daerah diduga menjadi penyebab fenomena *flypaper effect* sehingga dana transfer tidak dialokasikan dengan tepat oleh pemerintah daerah sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan.

Simpulan

Permasalahan tingginya ketergantungan keuangan pemerintah daerah pada dana transfer fiskal dari pemerintah pusat terutama DAU sebagai konsekuensi pelimpahan kewenangan pemerintahan melalui kebijakan desentralisasi fiskal tidak memberi dampak positif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Dugaan adanya fenomena *flypaper effect* terutama untuk membiayai pembangunan da-

erah yang tidak strategis dalam mengentaskan kemiskinan menjadi alasan berkurangnya dampak transfer fiskal terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Sementara itu, dengan pemikiran bahwa pajak lebih berperan dalam redistribusi pendapatan melalui transmisi *output* sektoral, maka studi ini ingin membuktikan bahwa kebijakan kapasitas fiskal daerah dari sumber utama pajak daerah dan bagi hasil pajak akan berdampak mempercepat pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dibandingkan kebijakan transfer fiskal serta lebih memihak mayoritas penduduk miskin, yaitu rumah tangga pertanian.

Dari hasil analisis simulasi kebijakan berdasarkan model persamaan simultan yang dibangun dapat disimpulkan bahwa *pertama*, ada fenomena *flypaper effect* yang ditunjukkan oleh nilai elastisitas belanja industri dan belanja perdagangan lebih besar daripada kapasitas fiskal. Sebaliknya, elastisitas belanja pertanian dan belanja infrastruktur terhadap kapasitas fiskal lebih besar daripada DAU. Artinya, pembiayaan pembangunan daerah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan lebih bergantung pada kapasitas fiskal yang bersumber dari pajak daripada transfer DAU.

Kedua, tingkat kemiskinan (*headcount index*) pertanian, industri, dan perdagangan dipengaruhi pengeluaran untuk konsumsi (pengeluaran per kapita) dan ketimpangan pendapatan (indeks Gini). Tingginya elastisitas kemiskinan terhadap pengeluaran per kapita menunjukkan penurunan angka kemiskinan sangat responsif terhadap peningkatan pengeluaran per kapita. Temuan ini sejalan dengan studi-studi sebelumnya, antara lain Ravallion dan Chen (1997) dan Miranti (2010).

Ketiga, hasil estimasi model menunjukkan pengeluaran per kapita akan meningkat jika upah riil tenaga kerja sektoral meningkat. Sebagai salah satu faktor yang dapat meningkatkan upah riil, maka pemerintah daerah harus mendorong PDRB sektoral melalui belanja-belanja daerah terutama yang bersumber dari

sumber daya lokal yaitu kapasitas fiskal.

Keempat, hasil estimasi yang menunjukkan elastisitas belanja-belanja pertanian dan infrastruktur terhadap kapasitas fiskal lebih besar daripada DAU menjadi dasar untuk melakukan simulasi kebijakan dengan instrumen fiskal pajak daerah, bagi hasil pajak, dan DAU. Di antara empat skenario kebijakan, kebijakan peningkatan kapasitas fiskal melalui kombinasi peningkatan penerimaan pajak daerah 20% dan bagi hasil pajak 10% berdampak paling besar dalam menurunkan tingkat kemiskinan di ketiga kelompok rumah tangga, menurunkan ketimpangan pendapatan, meningkatkan PDRB, mengurangi kesenjangan fiskal, dan meningkatkan kemandirian fiskal. Kebijakan ini juga paling memihak kelompok penduduk miskin pertanian yang mendominasi jumlah penduduk miskin di Indonesia yang ditunjukkan oleh persentase penduduk miskin pertanian turun paling tinggi, rata-rata upah riil pertanian meningkat paling besar, dan rata-rata pengeluaran per kapita pertanian meningkat paling besar. Sebaliknya, peningkatan DAU 5% bahkan lebih kecil dari rata-rata aktual berdampak memperburuk kondisi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Dengan demikian, kebijakan peningkatan kapasitas fiskal melalui instrumen pajak daerah dan bagi hasil pajak dapat berdampak mempercepat pengentasan kemiskinan dan perbaikan distribusi pendapatan yang diperoleh dari: (1) efek kapasitas fiskal pada belanja daerah; (2) efek belanja daerah pada PDRB sektoral; (3) efek PDRB sektoral pada upah riil; dan (4) efek upah riil pada pengeluaran konsumsi penduduk. Implikasi kebijakan antara lain: (1) reformasi pajak daerah, misalnya melalui devolusi pajak dan perluasan basis pajak; (2) reformasi pajak nasional untuk meningkatkan penerimaan pajak-pajak yang dapat dibagihasikan; (3) evaluasi porsi daerah dari bagi hasil pajak; (4) revisi formula DAU dengan menghapus faktor alokasi dasar dan/atau mengganti variabel-variabel proksi yang lebih mewakili

kebutuhan fiskal yang sebenarnya; dan (5) menyusun anggaran belanja daerah dalam APBD yang efektif dan efisien dalam mengentaskan kemiskinan. Saran studi lanjutan antara lain: (1) analisis menurut jenis-jenis pajak daerah; (2) analisis formula transfer fiskal yang tidak menimbulkan *flypaper effect*; dan (3) analisis dampak kapasitas fiskal terhadap kemiskinan dalam cakupan yang lebih spesifik, misalnya antarwilayah, antarpulau, dan antarperiode.

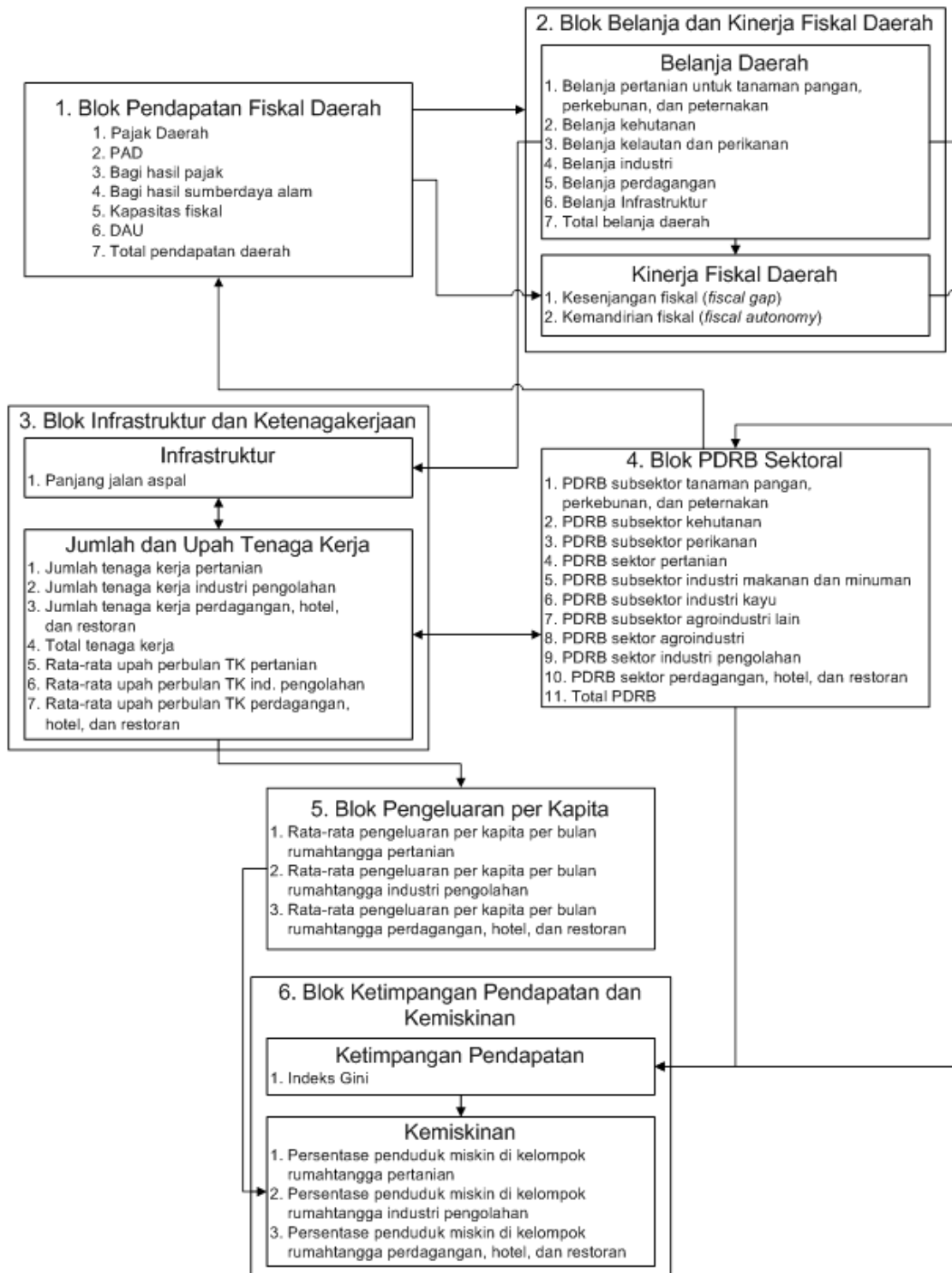
Daftar Pustaka

- [1] Abbott, D. (2007). *Pro-poor Policies: What are They? How Do They Contribute To the Achievement of the MDGs?* Paper presented at Sub-Regional Workshop for the North Pacific: Integrating MDGs into National Development Strategies and Budgets, 26–29 June 2007. Bangkok: United Nations Development Programme. http://www.undppc.org.fj/_resources/article/files/Day2_Session3_Pro-poor%20policies-David%20Abbott.ppt (Accessed September 6, 2012).
- [2] Afrizawati. (2012). Analisis *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi*, 2 (1), 21–30.
- [3] Amir, H., Asafu-Adjaye, J., & Ducpham T. (2013). The Impact of the Indonesian Income Tax Reform: A CGE Analysis. *Economic Modelling*, 31 (C), 492–501.
- [4] Balisacan, A. M., Pernia, E. M., & Asra, A. (2003). Revisiting Growth and Poverty Reduction in Indonesia: What Do Subnational Data Show? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 38 (2), 201–222.
- [5] Balitbang Depdagri & Fisipol UGM. (1991). *Pengukuran Kemampuan Daerah Tingkat II dalam Rangka Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.
- [6] Bird, R. M. (2011). Subnational Taxation in Developing Countries: A Review of the Literatur. *Journal of International Commerce, Economics and Policy*, 2 (1), 139–161. <http://www.itdweb.org/documents/SNtaxJICEP.pdf> (Accessed April 13, 2013).
- [7] Bourguignon, F. (2004). The Poverty-Growth-Inequality Triangle. *ICRIER New Delhi Working Papers*, 125. New Delhi: Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER). <http://www.icrier.org/pdf/wp125.pdf> (Accessed August 28, 2012).

- [8] BPS. (2008). *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2008*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [9] De Janvry, A., & Sadoulet, E. (2010). Agricultural Growth and Poverty Reduction: Additional Evidence. *World Bank Research Observer*, 25 (1), 1–20.
- [10] Eastwood, R., & Lipton, M. (2001). Pro-poor Growth and Pro-growth Poverty Reduction: Meaning, Evidence, and Policy Implications. *Asian Development Review*, 18 (2), 1–37.
- [11] Foster, J. E., Greer, J., & Thorbecke, E. (1984). A Class of Decomposable Poverty Measures. *Econometrica*, 52 (3), 761–766.
- [12] Gini, C. (1912). Measurement of Inequality of Incomes. *The Economic Journal*, 31 (121), 124–126.
- [13] Haughton, J., & Khandker, S. R. (2009). *Handbook on Poverty and Inequality*. Washington, D. C.: World Bank.
- [14] Indonesia, R. (2003). Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- [15] Indonesia, R. (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- [16] Indonesia, R. (2009). Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- [17] Indonesia, R. (2012). Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2013.
- [18] Kakwani, N. (1993). Poverty and Economic Growth with Application to Cote D'Ivoire. *Review of Income and Wealth*, 39 (2), 121–139.
- [19] Kakwani, N., & Pernia, E. M. (2000). What is Pro-poor Growth? *Asian Development Review*, 18 (1), 1–16.
- [20] Koutsoyiannis, A. (1977). *Theory of Econometrics: an Introductory Exposition of Econometric Methods*, 2nd ed. London: MacMillan Press, Ltd.
- [21] Kuncoro, H. (2004). Pengaruh Transfer Antar Pemerintah pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9 (1), 47–63. <http://journal.uui.ac.id/index.php/JEP/article/viewFile/624/550> (Accessed April 11, 2013).
- [22] Kuncoro, M. (2013). Mengurangi Ketimpangan. [Kompas, 2 Maret 2013]. <http://mudrajad.sinergianetwork.com/admin/mengurangi-ketimpangan/> (Accessed March 5, 2013).
- [23] Meier, G. M. (1995). *Leading Issues in Economic Development*, 6th ed. New York: Oxford University Press.
- [24] Miranti, R. (2010). Poverty in Indonesia 1984–2002: The Impact of Growth and Changes in Inequality. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 46 (1), 79–97.
- [25] Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*, 5th ed. McGraw-Hill.
- [26] Naganathan, M., & Sivagnanam, K. J. (2000). Federal Transfers and Tax Efforts of the States in India. *Indian Economic Journal*, 47 (4), 101–110.
- [27] Nanga, M. (2006). Dampak Transfer Fiskal terhadap Kemiskinan di Indonesia: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan. *Disertasi*. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- [28] Oates, W. E. (1999). An Essay of Fiscal Federalism. *Journal of Economics Literature*, XXXVII (3), 1120–1149.
- [29] OECD. (2006a). *Promoting Pro-poor Growth: Agriculture*. In Promoting Pro-Poor Growth: Policy Guidance for Donors. DAC Guidelines and Reference Series. A DAC Reference Document. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. <http://www.oecd.org/dac/povertyreduction/37922155.pdf> (Accessed August 15, 2012).
- [30] OECD. (2006b). *Promoting Pro-poor Growth: Infrastructure*. In Promoting Pro-Poor Growth: Policy Guidance for Donors. DAC Guidelines and Reference Series. A DAC Reference Document. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. <http://www.oecd.org/dac/povertyreduction/36301078.pdf> (Accessed September 11, 2012).
- [31] OECD. (2009a). *Promoting Pro-poor Growth: Social Protection*. In Promoting Pro-Poor Growth: Policy Guidance for Donors. DAC Guidelines and Reference Series. A DAC Reference Document. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. <http://www.oecd.org/dac/povertyreduction/43514563.pdf> (Accessed September 14, 2012).
- [32] OECD. (2009b). *Promoting Pro-poor Growth: Employment*. DAC Guidelines and Reference Series. A DAC Reference Document. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. <http://www.oecd.org/dac/povertyreduction/43514554.pdf> (Accessed September 14, 2012).
- [33] Panjaitan, M. (2006). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Perekonomian Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara: Suatu Pendekatan Ekonometrika. *Disertasi*. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- [34] Pardede, R. (2004). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara dan Kota Medan: Aplikasi Model Input-Output. *Disertasi*. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- [35] Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (1991). *Eco-*

- nometric Models and Economic Forecasts*, 3rd ed. New York: McGraw-Hill.
- [36] Qiao, B., Martinez-Vazquez, J., & Xu, Y. (2008). The Tradeoff Between Growth and Equity in Decentralization Policy: China's Experience. *Journal of Development Economics*, 86 (1), 112–128.
- [37] Ravallion, M. (1995). Growth and poverty: evidence for developing countries in the 1980s. *Economics Letters*, 48 (3), 411–417.
- [38] Ravallion, M., & Datt, G. (2002). Why Has Economic Growth Been More Pro-Poor in Some States of India Than Others? *Journal of Development Economics*, 68 (2), 381–400.
- [39] Ravallion, M., & S. Chen. (1997). What Can New Survey Data Tell Us about Redent Changes in Distribution and Poverty? *World Bank Economic Review*, 11 (2), 357–382.
- [40] Sinaga, B. M. & Siregar, H. (2003). Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Indonesia. *Laporan Penelitian*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- [41] Son, H. H., & Kakwani, N. (2004). Economic Growth and Poverty Reduction: Initial Conditions Matter. *International Poverty Centre Working Paper*, 2. Brazil: International Poverty Centre, UNDP. <http://www.ipc-undp.org/pub/IPCWorkingPaper2.pdf> (Accessed March 20, 2014).
- [42] Suryahadi, A., Suryadarma, D., & Sumarto, S. (2009). The Effects of Location and Sectoral Components of Economic Growth on Poverty: Evidence from Indonesia. *Journal of Development Economics*, 89 (1), 109–117.
- [43] Suryahadi, A., Hadiwidjaja, G., & Sumarto, S. (2012). Economic Growth and Poverty Reduction in Indonesia Before and After the Asian Financial Crisis. *Working paper*. Jakarta: The SMERU Research Institute. <http://www.smeru.or.id/report/workpaper/econgrow2/econgrow2.pdf> (Accessed August 18, 2013).
- [44] Suyanto. (2010). *Flypaper Effect Theory* dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11 (1), 69–92. http://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/1287/JEP_No.11_Vol.1_6_Suyanto.pdf?sequence=1 (Accessed April 6, 2013).
- [45] Warr, P. (2006). Poverty and Growth in Southeast Asia. *ASEAN Economic Bulletin*, 23 (3), 279–302.
- [46] Whitfield, L. (2008). Pro-Poor Growth: A Review of Contemporary Debates. *Working Paper*. Denmark: Danish Institute for International Studies (DIIS).
- [47] Wilde, J. A. (1968). The Expenditure Effects of Grant-in-Aid Programs. *National Tax Journal*, 21 (3), 340–348
- [48] World Bank. (2007). *Kajian Pengeluaran Publik Indonesia 2007*. Jakarta: World Bank.
- [49] Yudhoyono, S. B. (2004). Pembangunan Pertanian dan Perdesaan Sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran: Analisis Ekonomi-Politik Kebijakan Fiskal. *Disertasi*. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Gambar 4: Keterkaitan Antarblok dalam Model



Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Tabel 9: Keterangan Variabel

Variabel	Deskripsi	Satuan	Jenis Variabel	Sumber
DAU	Dana Alokasi Umum	Juta Rp	Endogen	Kemenkeu
KAPFIS	Kapasitas fiskal = PAD + bagi hasil pajak + bagi hasil sumber daya alam	Juta Rp	Endogen	Diolah
PAD	Pendapatan Asli Daerah	Juta Rp	Endogen	Kemenkeu
GPGNKBTNK	Belanja pertanian	Juta Rp	Endogen	Kemenkeu
GPGNKBTNKL	Belanja pertanian tahun sebelumnya	Juta Rp	Lag Endogen	Kemenkeu
GHTN	Belanja kehutanan	Juta Rp	Endogen	Kemenkeu
GHTNL	Belanja kehutanan tahun sebelumnya	Juta Rp	Lag Endogen	Kemenkeu
GKAN	Belanja kelautan dan perikanan	Juta Rp	Endogen	Kemenkeu
GKANL	Belanja kelautan dan perikanan tahun sebelumnya	Juta Rp	Lag Endogen	Kemenkeu
GIND	Belanja industri	Juta Rp	Endogen	Kemenkeu
GINDL	Belanja industri tahun sebelumnya	Juta Rp	Lag Endogen	Kemenkeu
GDG	Belanja perdagangan	Juta Rp	Endogen	Kemenkeu
GDGL	Belanja perdagangan tahun sebelumnya	Juta Rp	Lag Endogen	Kemenkeu
GIFR	Belanja infrastruktur (pekerjaan umum)	Juta Rp	Endogen	Kemenkeu
GIFRL	Belanja infrastruktur tahun sebelumnya	Juta Rp	Lag Endogen	Kemenkeu
G	Total belanja daerah	Juta Rp	Endogen	Kemenkeu
FISAUTO	Kemandirian fiskal (<i>fiscal autonomy</i>) = PAD/G x 100	%	Endogen	Diolah
FISGAP	Kesenjangan fiskal = G - KAPFIS	Juta Rp	Endogen	Diolah
ASP	Panjang jalan aspal	km	Endogen	Kemen PU
PDRBTANI	PDRB pertanian	Juta Rp	Endogen	BPS
PDRBTANIKAP	PDRB pertanian per kapita	Juta Rp	Endogen	Diolah
SHPDRBPGNKBTNK	Share PDRB tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan pada total PDRB	Ribu Rp	Endogen	Diolah
SHPDRBHTN	Share PDRB kehutanan pada total PDRB	%	Endogen	Diolah
SHPDRBKAN	Share PDRB kelautan dan perikanan pada total PDRB	%	Endogen	Diolah
SHPDRBIND	PDRB industri	Juta Rp	Endogen	BPS
PDRBINDGR	Pertumbuhan PDRB industri	%	Endogen	Diolah
PDRBDG	PDRB sektor perdagangan, hotel, dan restoran	Juta Rp	Endogen	BPS
PDRBDGGR	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan, hotel, dan restoran	%	Endogen	Diolah
PDRB	Total PDRB	Juta Rp	Endogen	BPS
IFL	Laju inflasi provinsi (perubahan rata-rata IHK provinsi antartahun)	%	Eksogen	Diolah
TKTANI	Jumlah tenaga kerja pertanian	Ribu orang	Endogen	BPS
TKTANIL	Jumlah tenaga kerja pertanian tahun sebelumnya	Ribu orang	Endogen	BPS
TKIND	Jumlah tenaga kerja industri	Ribu orang	Endogen	BPS
TKINDL	Jumlah tenaga kerja industri tahun sebelumnya	Ribu orang	Endogen	BPS
TKDGL	Jumlah tenaga kerja perdagangan	Ribu orang	Endogen	BPS
TKDGL	Jumlah tenaga kerja perdagangan tahun sebelumnya	Ribu orang	Endogen	BPS
TK	Jumlah tenaga kerja	Ribu orang	Endogen	BPS
UPHTANI	Rata-rata upah per bulan pertanian	Ribu Rp	Endogen	BPS
UPHTANIL	Rata-rata upah per bulan pertanian tahun sebelumnya	Ribu Rp	Endogen	BPS
UPHIND	Rata-rata upah per bulan industri	Ribu Rp	Lag Endogen	BPS
UPHINDL	Rata-rata upah per bulan industri tahun sebelumnya	Ribu Rp	Endogen	BPS
UPHDG	Rata-rata upah per bulan perdagangan	Ribu Rp	Lag Endogen	BPS
UPHDGL	Rata-rata upah per bulan perdagangan tahun sebelumnya	Ribu Rp	Endogen	BPS
UMP	Upah minimum provinsi	Ribu Rp	Lag Endogen	BPS
MYS	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15+	Tahun	Eksogen	Kemenakertrans
EXPTANI	Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan rumah tangga pertanian	Ribu Rp	Endogen	SUSENAS (Diolah)
EXPIND	Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan rumah tangga industri	Ribu Rp	Endogen	SUSENAS (Diolah)
EXPDPG	Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan rumah tangga perdagangan	Ribu Rp	Endogen	SUSENAS (Diolah)
GINI	Indeks Gini	%	Endogen	BPS
POVTANIPO	Headcount Index pertanian	%	Endogen	SUSENAS (Diolah)
POVTANIP0L	Headcount Index pertanian tahun sebelumnya	%	Lag Endogen	SUSENAS (Diolah)
POVINDP0	Headcount Index industri	%	Endogen	SUSENAS (Diolah)
POVINDP0L	Headcount Index industri tahun sebelumnya	%	Lag Endogen	SUSENAS (Diolah)
POVDGPO	Headcount Index perdagangan	%	Endogen	SUSENAS (Diolah)
POVDGPO0L	Headcount Index perdagangan tahun sebelumnya	%	Lag Endogen	SUSENAS (Diolah)
TREND	Tren waktu	%	Lag Endogen	SUSENAS (Diolah)

Catatan: Nilai Rupiah dalam nominal dikonversi ke ril menggunakan IHK provinsi tahun dasar 2007

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis